INTERAKSI FUNGSI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Siti Nurhasanah

ABSTRAK

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memberi peranan penting pada organ perseroan. Pentingnya peranan ini karena kedudukannya sebagai subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban pribadi pemiliknya. Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas akan merugikan kepentingan perseroan sebagai badan hukum dan pemegang saham minoritas secara khusus, apabila masing-masing organ dalam menjalankan fungsinya tidak mendahulukan kepentingan perseroan secara baik, tetapi didasarkan adanya faktor kedekatan pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Direksi dan Komisaris.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Saham Minoritas*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang ekonomi dan dunia usaha, menjadikan pengaturan Perseroan terbatas (PT) dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dipandang tidak sesuai lagi, dan karenanya lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas ini banyak membawa perubahan terhadap interaksi fungsi organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, memberikan peranan organ perseroan yang demikian penting. Hal ini tidak lain karena kedudukannya sebagai subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban pribadi pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa perantara organ perseroan, hak dan kewajiban yang dimiliki Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hubungannya dengan organ Perseroan Terbatas, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan 3 (tiga) macam organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Ketiganya memiliki fungsi masing-masing yang diharapkan

mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.

Interaksi fungsi organ RUPS, Direksi, dan Komisaris kita dapat lihat dalam pengaturan seperti RUPS adalah organ yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris. Sebaliknya Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan dan Komisaris dalam fungsi utamanya melakukan pengawasan, harus menyusun laporan tahunan yang dimintakan pengesahan kepada RUPS.

Interaksi fungsi organ perseroan tersebut, sesungguhnya tidak saja rawan bagi kepentingan perseroan tetapi juga bagi kepentingan pemegang saham minoritas. Berlakunya prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan oleh RUPS, memberikan konsekuensi pemegang saham yang memiliki saham mayoritas akan lebih banyak menentukan arah kebijakan perseroan. Sebaliknya terjadi dengan pemegang saham minoritas tidak dapat berbuat banyak. Prinsip mayoritas dapat berupa mayoritas mutlak misalnya keputusan diambil jika terpenuhi 3/4 atau 2/3 suara pemegang saham, atau berupa mayoritas sederhana seperti suara telah mencapai 51% dari jumlah suara di dalam RUPS. Tentulah bagi pemegang saham mayoritas, melalui prinsip *One Share One Vote* kebijakan apa yang dihendaki pemegang saham mayoritas, menjadi tidak sulit direalisasikan. Paling membahayakan bila

pemegang saham mayoritas memiliki suatu badan usaha lain dan membutuhkan perhatian yang lebih banyak sehingga harus mengorbankan perseroan yang ada.

Contoh kasus terjadi pada bank terlikuidasi setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh Menteri Keuangan karena pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank-bank swasta dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas itu, dimanfaatkan oleh pemegang sahamnya sebagai sapi perah melalui penarikan kredit dalam jumlah besar guna kepentingan usaha lain yang menjadi anggota group. Akibatnya bank sebagai perseroan bukan saja tidak mampu mengembalikan uang nasabah, tetapi untuk kepentingan perseroan itu sendiri dana yang ada sudah tidak cukup. Dalam kasus ini, interaksi pemegang saham mayoritas sebagai anggota RUPS, banyak mempengaruhi kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris. Akibatnya tidak saja perseroan yang menderita kerugian, tetapi banyak pihak termasuk pemegang saham minoritas.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, adalah:

- mengapa interaksi fungsi organ perseroan dapat merugikan perseroan dan pemegang saham minoritas?
- bagaimana suatu perlindungan hukum diberikan pada kepentingan perseroan dan pemegang saham minoritas?

Jenis penelitian adalah Normatif, menggunakan analisis norma-norma hukum mengenai interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Metode analisis secara kualitatif. Simpulan dilakukan dengan cara deduktif-induktif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, membawa kedudukannya sebagai subyek hukum yang sama dengan orang (manusia) yaitu memiliki hak dan kewajiban sendiri. Apabila manusia dalam melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya membutuhkan keberadaan organ yang disebut "organ tubuh", maka Perseroan

Terbatas sebagai badan hukum juga memerlukan keberadaan organ yang disebut "organ Perseroan Terbatas" guna melaksanakan hak dan kewajibannya.

Laica Marzuki mengatakan, status badan hukum (*rechtspersoon*) bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para pesero pengurus.¹ Dari sini dapat diketahui suatu Perseroan Terbatas, membutuhkan pengorganisasian yang teratur melalui kehadiran organ, agar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dapat terealisasi. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, membawa implikasi pada fungsi "organ Perseroan Terbatas" yaitu semata-mata untuk kepentingan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah:

- mengubah Anggaran Dasar (Pasal 14);
- membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. (Pasal 31 dan 32);
- menambah modal perseroan kecuali diserahkan Komisaris (Pasal 34);
- mengurangi modal perseroan (Pasal 37);
- memberikan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan (Pasal 60);
- menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan uang untuk cadangan (Pasal 62);

¹ H.M. Laica Marzuki, 1996. *Aspek Hukum Administrasi dari Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995)*, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No.3, Tahun XXVI, Juni 1996, hal. 215)

- g. memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris (Pasal 63);
- h. mengangkat Direksi (pasal 80) dan Komisaris (Pasal 95);
- i. menetapkan pembagian fungsi setiap anggota Direksi dan jenis penghasilan Direksi, kecuali dilimpahkan kepada Komisaris (Pasal 81);
- j. memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan Terbatas (Pasal 88);
- k. memberikan keputusan tentang permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri (Pasal 90);
- l. memberhentikan Direksi dan Komisaris secara tetap atau sementara dengan menyebutkan alasan (Pasal 91, 92 dan 101);
- m. menyetujui Rancangan Penggabungan, Peleburan, atau pengambilalihan perusahaan (Pasal 102 dan 103);
- n. memberikan keputusan pembubaran PT (Pasal 115);
- o. Menerima pertanggungjawaban Likuidator atas likuidasi yang dilakukannya (Pasal 124).

Dalam mengambil keputusan tersebut, RUPS melakukannya di dalam suatu rapat tahunan dan rapat lain yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Direksi.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Fungsi lain adalah:

- a. menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya (pasal 66);
- b. menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa dalam hal; bidang usaha perseroan berkaitan dengan dana masyarakat; perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau perseroan merupakan Perseroan Terbatas Terbuka;
- c. mendaftarkan akta pendirian perseroan beserta perubahannya dan surat persetujuan Menteri Kehakiman dalam Daftar Perusahaan.

Terakhir tentang fungsi Komisaris merupakan organ perseroan yang tugas utamanya, adalah melakukan pengawasan atas jalannya perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Berkenaan dengan kehadiran organ Komisaris ini, Normin S. Pakpahan mengatakan, bahwa sistem organ perseroan dengan adanya organ pengawas/Komisaris adalah sistem dua tingkat (*two Board System*).² Sedangkan organ perseroan tanpa organ pengawas/Komisaris adalah sistem satu tingkat (*One Board System*). Berbeda dengan Direksi, dalam pengaturan organ Komisaris jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang maka sebagai majelis/dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Hal ini berarti dapat memberikan akibat hukum terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas dipersonifikasikan sebagai perbuatan hukum Perseroan Terbatas.

Apabila perbuatan hukum organ tersebut memberikan kerugian pada pihak ketiga (masyarakat), maka yang bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas. Fungsi organ RUPS, Direksi dan Komisaris tersebut adalah fungsi yang dipersonifikan sebagai perbuatan hukum PT sebagai badan hukum. Rudhi Prasetya mengatakan, tentang "Direksi", "Komisaris" dan "Rapat Umum Pemegang Saham" sebagai organ dari PT, pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama/sejajar yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri; Tidak berarti selaku Direksi atau Komisaris semata-mata harus berkiblat pada kepentingan pemegang saham yang selalu harus menjadi sentral dari kebijaksanaannya. Konsep ini tidak lain atas dasar konsep kebadan hukuman³. Terkecuali jika perbuatan yang dilakukan oleh organ terbukti bukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas tetapi dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya, atau perbuatan hukum yang dilakukan organ dalam menjalankan fungsinya bertentangan dengan undang-undang dan atau Anggaran Dasar

² Normin S Pakpahan, 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia-Tinjauan Terhadap UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar FH Unhas, Ujung Pandang., hal. 32

³ Rudhi Prasetya, 1995 *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 220

Konsekuensi pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini, maka terhadap fungsi organ RUPS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada PT. Artinya, dalam semua keputusan yang diambil organ RUPS di dalam rapat umum harus dilakukannya sesuai fungsi yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan kepadanya.

Hoge Raad menyatakan: "Suatu Rapat Pemegang Saham juga harus terikat dan tunduk serta tidak boleh melanggar batas-batas kewenangannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan statuta."⁴

Suatu kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang apabila disalahgunakan, sudah jelas akan merugikan perseroan, dan kerugian ini harus menjadi tanggungjawab RUPS yang bersangkutan. Akan tetapi apabila RUPS di dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan yang diberikan undang-undang dan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka kerugian apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Dalam hubungannya dengan kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka terhadap fungsi organ RUPS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada PT. Ini berarti fungsi organ RUPS harus dilakukannya sesuai batas kewenangan yang ditentukan undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan kepadanya. Suatu fungsi yang apabila disalahgunakan dan merugikan perseroan, maka kerugian ini harus menjadi tanggungjawab RUPS yang bersangkutan. Misalnya merugikan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Minoritas, karyawan dari suatu Perseroan Terbatas dan atau pihak ketiga (masyarakat). Sebaliknya jika dalam pelaksanaan fungsinya sesuai dengan yang diberikan undang-undang dan atau Anggaran Dasar Perseroan, maka kerugian apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Atas kerugian yang diderita akibat penyalagunaan kewenangan oleh RUPS, maka Direksi dan atau Komisaris sebagai organ yang diadakan untuk mewakili kepentingan perseroan sebagai badan hukum berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan menuntut RUPS.

Kewenangan Direksi (termasuk Komisaris) ini, disebut sebagai konsep *locus standi*.⁵

Dari telaah pustaka yang dikemukakan sebelumnya, kita dapat pula mengetahui adanya kerugian yang diderita akibat penyalahgunaan fungsi RUPS, Direksi dan atau Komisaris. Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 memberikan konsep *locus standi* kepada pemegang saham, maksudnya apabila Direksi dan atau Komisaris tidak menjalankan fungsinya, maka kepada pemegang saham paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, diberikan hak *derivative action* untuk bertindak atas nama dan mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan/tuntutan terhadap organ Direksi dan/atau Komisaris melalui pengadilan, atas tindakannya terutama yang berhubungan dengan konsep *locus standi* yang tidak dijalankan sehingga merugikan kepentingan perseroan, pemegang saham atau pihak lain.

Pasal 82 menyatakan:

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 85 Ayat (1) menyatakan: Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Terhadap fungsi Komisaris, menurut ketentuan Pasal 98 Ayat (1):

Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fungsinya untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Jika Direksi dan atau Komisaris tidak menjalankan fungsi mewakili perseroan untuk menuntut RUPS yang menyalahgunakan fungsinya, maka menurut Muchyar Yara dalam perjalanan perseroan, pemegang saham menjumpai adanya perbuatan dari organ-organ perseroan (RUPS atau Direksi atau Komisaris) yang patut diduga menyebabkan kerugian atau terganggunya kepentingan perseroan, maka

⁴ *Ibid.* hal. 221.

⁵ Muchyar Yara, 1995. *Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No. 3, Tahun XXV, Juni 1995, hal.142.

pemegang saham yang bersangkutan akan menemui kesulitan untuk tampil dengan mengatasnamakan perseroan guna membela kepentingan perseroan yang dirugikan itu, karena terhalang oleh konsep *locus standi*. Untuk mengatasi hambatan yang tercipta dari konsep *locus standi*, maka hukum perseroan modern memperkenalkan hak khusus pemegang saham untuk bertindak atas nama dan mewakili perseroan yang dinamakan sebagai *derivative action*.⁶ Dengan *derivative action* ini pemegang saham dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan di dalam mengajukan gugatan/tuntutan terhadap organ-organ perseroan yaitu Direksi atau Komisaris melalui pengadilan, apabila dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perseroan, pemegang saham atau pihak lain.

Hak *derivative action* yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, kita dapat temukan dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (3) dan Pasal 98 Ayat (2). Dalam Pasal 85 Ayat (3), dinyatakan bahwa:

Atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan”.

Apabila dalam pasal ini sasarannya tertuju kepada Direksi, maka dalam Pasal 98 Ayat (2) di tujukan kepada Komisaris, sebagai berikut:

Atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada perseroan.

Tanggung jawab RUPS yang nota bene adalah juga sebagai pemegang saham, maka setiap pemegang saham yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dapat dibebani tanggung jawab mengganti kerugian. Muchyar Yara mengatakan: “Meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas

ini masih diterima, namun perkembangan zaman telah menggesernya menjadi bersifat tidak mutlak lagi.⁷ Dimana dalam keadaan-keadaan tertentu secara luas telah pula diterima prinsip “*piercing the corporate veil*”, yaitu prinsip yang membuka kemungkinan pemegang saham perseroan dimintakan pertanggungjawaban yang lebih besar daripada sekedar besarnya saham yang dimilikinya. Artinya pemegang saham perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi (termasuk kekayaan pribadi) atas kerugian yang diderita perseroan, jika terpenuhi keadaan tertentu (syarat-syarat tertentu) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Munir Fuady bahwa, doktrin *piercing the corporate veil* ini tidak terdapat dalam KUHD, tetapi secara sangat simpel diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Doktrin ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*).⁸

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, keadaan-keadaan tertentu (syarat-syarat tertentu) yang dimaksud, dapat kita lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yaitu:

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuatnya atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila :
 - a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

⁷ Ibid.

⁸ Munir Fuady. 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 61.

⁶ Ibid, hal. 243.

- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Kewenangan Direksi dan atau Komisaris untuk menuntut RUPS melalui pengadilan (*locus standi*), demikian pula kewenangan pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 1/10 dari jumlah saham perseroan untuk menuntut Direksi dan/atau Komisaris (*derivative action*), adalah suatu hal yang baru diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang kita tidak dapatkan dalam ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Mengenai perlindungan pemegang saham minoritas, I. G. Rai Widjaja mengatakan bahwa adanya prinsip mayoritas dalam pengambilan suara pada RUPS menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang lebih mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas. Prinsip mayoritas memberikan justifikasi bahwa perseroan dikendalikan berdasarkan kehendak mayoritas pemegang sahamnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di samping karena adanya prinsip *persona standi in judicio* atau juga disebut prinsip *locus standi* yang memberikan hak hanya kepada Direksi atau Komisaris mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁹

Sebagai upaya mengatasi prinsip mayoritas dan *locus standi* tersebut, maka U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan hak hak perseorangan dan hak derivatif kepada pemegang saham minoritas. Hak perseorangan (*personal rights*), merupakan konsekuensi kepemilikan atas saham memberikan hak kebendaan kepada pemegang saham yang dapat diwujudkan. Artinya pemegang saham dapat menuntut pelaksanaan haknya terhadap perseroan, dalam hal haknya sebagai-

mana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dilanggar sehingga menimbulkan kerugian padanya. Adapun tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas ini dapat bersumber dari keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris sebagai organ perseroan.

Sementara hak derivatif, yaitu hak yang secara khusus diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hanya saja, dalam undang-undang hak derivatif ini diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Hak derivatif dalam hal ini terwujud dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (2), Pasal 67, Pasal 85 Ayat (3), Pasal 98 Ayat (2), Pasal 110 Ayat (3) dan Pasal 117 Ayat (1) huruf b.

Pasal 66 Ayat (2) memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk meminta diselenggarakan RUPS kepada Direksi atau Komisaris dengan disertai alasannya. Bila Direksi atau Komisaris menolak melakukan pemanggilan RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 pemegang saham minoritas ini dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk diberi izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini diberi kewenangan untuk menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat dengan ketentuan undang-undang ini atau Anggaran Dasar, dan sekaligus memerintahkan Direksi atau Komisaris untuk hadir dalam rapat tersebut. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat final.

Pasal 85 Ayat (3) dan Pasal 98 Ayat (2) merupakan hak yang paling jelas menampilkan cirinya sebagai hak derivatif. Kedua pasal ini memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Apabila diperhatikan maka sesungguhnya baik hak perorangan maupun hak derivatif bukan hanya milik para pemegang saham minoritas tetapi

⁹ I.G. Rai Widjaja. 1996. *Hukum Perusahaan- Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, hal. 39

milik semua para pemegang saham di dalam Perseroan Terbatas yang bersangkutan, hanya saja yang paling berkepentingan terhadap adanya hak-hak tersebut adalah para pemegang saham minoritas. Hal ini dikatakan pula oleh I.G. Rai Widjaya yang menyatakan dalam hal ini jelas bahwa ketentuan tersebut memberi perlindungan yang baik kepada pemegang saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang di dalam memanfaatkan ketentuan itu adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun telah diputuskan oleh RUPS¹⁰.

Demikian pula oleh Muchyar Yara yang mengungkapkan: Meskipun *personal right* dan *derivative action* ini pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, namun di dalam kenyataannya hak ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Sedangkan di lain pihak pemegang saham mayoritas kurang memerlukan kedua hak ini dalam rangka melindungi kepentingannya. Pemegang saham mayoritas kurang memerlukan kedua hak ini. Sulit dipungkiri bahwa di dalam prakteknya derajat kedekatan pemegang saham mayoritas dengan perseroan masih tetap tinggi, terutama kedekatan pemegang saham mayoritas dengan organ-organ perseroan yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal ini disebabkan karena masih diakuinya “prinsip mayoritas” yang memberikan pembenaran terhadap pendapat perseroan dikendalikan berdasarkan kehendak pemegang saham mayoritas.¹¹

Melalui hak tersebut pemegang saham minoritas dapat memanfaatkan untuk melindungi kepentingannya atau kepentingan perseroan dari tindakan:

- a. Direksi/Komisaris yang merugikan perseroan dan berdampak langsung pada pemegang saham minoritas;
- b. pemegang saham mayoritas melalui mekanisme RUPS.

Muchyar Yara mengatakan, bahwa kedua hak yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut

(hak perorangan dan hak derivatif) bukan dimaksudkan untuk mengenyampingkan “prinsip mayoritas”, melainkan semata-mata untuk mengimbangi saja, di mana diharapkan pemegang saham dapat dicegah untuk bertindak sewenang-wenang sebagai layaknya “diktator mayoritas” yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas¹².

Adanya konsep *locus standi*, *derivative action* dan prinsip *piercing the corporate veil* inilah kiranya, sehingga Rudhi Prasetya, mengatakan, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengikuti pandangan mutakhir. Berhubung kita telah ketahui dalam Pasal 36 s/d 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sebelumnya mengatur tentang Perseroan Terbatas, konsep atau prinsip tersebut sama sekali tidak dikenal.¹³

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham yang melakukan kesalahan baik melalui RUPS maupun kesalahan yang dilakukan di luar organ RUPS hingga merugikan perseroan tidak lagi terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, tetapi meliputi kekayaan pribadi sesuai prinsip *piercing the corporate veil*. Jadi berbeda dengan tanggung jawab pemegang saham yang tidak melakukan kesalahan, atas kerugian perseroan yang bersangkutan hanya bertanggung jawab sesuai nilai saham yang dimilikinya atau yang telah dimasukkannya menjadi modal perseroan tersebut.

Adanya interaksi fungsi organ RUPS yang lebih diwarnai kepentingan pemegang saham mayoritas sesuai prinsip mayoritas yang berlaku dalam pengambilan suara pada RUPS, maka kepada pemegang saham minoritas yang dalam hal ini paling sedikit memiliki 1/10 (satu per sepuluh) saham dari seluruh saham yang dimiliki perseroan UU No. 1 Tahun 1995 memberikan hak perseorangan dan hak derivatif untuk melindungi kepentingannya.

Walaupun pada hakikatnya ke dua hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, namun di dalam kenyataannya hak ini lebih ditujukan untuk melindungi

¹⁰ Ibid hal. 38.

¹¹ Muchyar Yara, 1995. Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No. 3, Tahun XXV, Juni 1995, hal. 244

¹² Ibid.

¹³ Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 222.

kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas kurang memerlukan kedua hak ini dalam rangka melindungi kepentingannya, karena pemegang saham mayoritas di dalam prakteknya memiliki derajat kedekatan dengan RUPS berdasarkan prinsip mayoritas di dalam pengambilan hak suara yang dikenal dengan prinsip *one share one vote*. Selanjutnya melalui interaksi fungsi organ RUPS dengan Direksi dan Komisaris, khususnya menyangkut fungsi organ RUPS mengesahkan laporan tahunan Direksi dan Komisaris oleh RUPS, di samping fungsi mengangkat dan memberhentikan organ Direksi dan Komisaris, menjadikan kedua hak tersebut tidak penting bagi pemegang saham mayoritas.

Dapat dikatakan adanya *personal right* dan *derivative action*, semata-mata dimaksudkan untuk mengimbangi prinsip "mayoritas" dan prinsip *locus standi* di dalam interaksi fungsi-fungsi organ di dalam Perseroan Terbatas, guna mencegah tindakan sewenang-wenang sebagai layaknya "diktator mayoritas" yang dapat merugikan kepentingan perseroan pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Interaksi fungsi organ Perseroan Terbatas akan merugikan kepentingan perseroan sebagai badan hukum dan pemegang saham minoritas secara khusus, apabila masing-masing organ dalam menjalankan fungsinya tidak mendahulukan kepentingan perseroan secara baik, tetapi didasarkan adanya faktor kedekatan pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Direksi dan Komisaris.

Perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang organ perseroan diberikan pada kepentingan perseroan dan pemegang saham minoritas, melalui cara pengaturan hak perseorangan dan hak derivatif kepada pemegang saham yang paling sedikit memiliki 1/10 bagian dari jumlah saham perseroan.

Saran

Dalam upaya menghindari faktor kedekatan pemegang saham mayoritas dengan organ terlalu

sulit dihindari karena fungsi RUPS dan prinsip mayoritas, maka upaya lain disarankan perlunya penyuluhan akan makna yang sesungguhnya dari PT sebagai subjek hukum mandiri, di mana setiap organ harus melaksanakan fungsinya semata-mata untuk kepentingan perseroan, dan secara langsung undang-undang melindungi pelaksanaan fungsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- H.M. Laica Marzuki, 1996. *Aspek Hukum Administrasi dari Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995)*, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No.3, Tahun XXVI, Juni 1996.
- Ali Ridho, 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- I.G. Rai Widjaja. 1996. *Hukum Perusahaan - Khusus Pemahaman Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muchyar Yara, 1995. *Prinsip-Prinsip Sistim Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No. 3, Tahun XXV, Juni 1995.
- Normin S Pakpahan, 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia-Tinjauan Terhadap UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar FH Unhas, Ujung Pandang.
- Rudhi Prasetya, 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.